Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan

Application Of The Reversal Of The Burden Of Proof In The Crime Of Money Laundering In Medan City

Fauziah Lubis¹⁾ & Nasrullah Hidayat^{2)*}

1) Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

2) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Medan Indonesia

*Corresponding Email: nasrullahhidayat@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Kota Medan. Masalah pencucian uang ini difokuskan kepada kajian yuridis tentang proses pembuktian terbalik di pengadilan. Guna menganalisis masalah ini peneliti mengacu pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian empiris normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan wawancara, observasi dan kajian literatur. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum tentang pembuktian terbalik dalam tindak kejahatan pencucian uang sudah dijalankan sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78, dengan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Pembuktian harus dilakukan oleh terdakwa berupa penjelasan asal usul harta kekayaan yang tidak berasal dari hasil dari tindak pidana dan perbuatan haram seperti yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan Pasal 183 KUHP yang mengatur tentang penentuan pidana bagi terdakwa apabila didapati bukti kesalahan minimal ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, penerapan pembuktian terbalik merujuk kepada pada UU No. 8 tahun 2010 bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari kejahatan.

Kata Kunci: Undang-undang; Pembuktian Terbalik; Pencucian Uang.

Abstract

The purpose of this study is to examine the application of reverse evidence in the money laundering law in the city of Medan. The issue of money laundering is focused on a juridical study of the reverse proof process in court. In order to analyze this problem, the researcher refers to Article 77 and Article 78 of the Money Laundering Law. This type of research is qualitative research and uses empirical research methods. Data collection was carried out by means of interviews, observation and literature review. Then analyzed qualitatively. The result of this research is the application of the law regarding reverse proof in money laundering crimes has been carried out in accordance with Article 77 and Article 78, with the burden of proof being imposed on the defendant. Therefore, this study also finds that the evidence that must be carried out by the defendant is in the form of the origin of assets that do not come from the proceeds of criminal acts and unlawful acts as stated in Article 2 paragraph (1) of the Money Laundering Law. In addition, the application of Article 183 of the Criminal Procedure Code which regulates the determination of a criminal offense for a defendant if evidence of guilt is found at least two pieces of evidence plus the judge's belief that a crime has actually occurred. The application of reverse evidence refers to Law no. 8 of 2010 is mandatory for the defendant to prove that his assets do not originate from a crime.

Keywords: Laws; Reverse Evidence; Money Laundering.

How to Cite: Lubis, F. & Hidayat, N. (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 14 (2): 34-39.

PENDAHULUAN

Dalam masalah penegakan hukum, kasus pencucian uang tidak lagi merupakan permasalahan yang sederhana, melainkan rumit dikarenakan begitu kompleks dan cukup sulitnya untuk merumuskan delik-delik hukumnya secara objektif dan efektif (Miroharjo, 2015). Hal ini terlihat dari batasan konseptual yang cukup banyak dan bervariasi.

Seperti itu juga di antara lembaga dan organisasi internasional yang kompeten di dunia yang pada hakikatnya mumpuni di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan pencucian uang tidak terlepas dari permasalahan ekonomi di setiap negara. Maka fokus pemberantasannya menyoroti masalah ekonomi.

Seorang analisis ekonomi pasti membutuhkan respons hukum yang akurat, baik di tingkat internasional untuk dapat mendeteksi tindak kejahatan pencucian uang. Hukum anti pencucian uang biasanya memerlukan pendekatan multi disiplin yang menggabungkan profil represif dengan mekanisme pencegahan dan evaluasi empiris. Pencucian uang tidak hanya terjadi di tingkat nasional maupun internasional bahkan sudah merambah ke tingkat daerah, sehingga menarik untuk diteliti. Disamping dampak yang diakibatkan oleh aksi tindak pidana pencucian uang sangat luar biasa juga mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan daerah, bahkan dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat (Wibowo, 2018).

Problematika pencucian uang banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara. (Bismar Nasution, 2014).

Indonesia melakukan kriminalisasi pencucian uang merujuk pada Undang-undang No. 15 Tahun 2002 (Arifin & Choirinnisa, 2019). Tidak hanya berlaku di

Pusat, untuk tingkat daerah pun diberlakukan, sehingga sampai saat ini masih banyak ditemukan masalah pencucian uang seperti pencucian uang melalui bisnis narkoba di Kota Medan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dan pemerintah Kota Medan selalu bersinergi untuk memberantas tindak pidana pencucian uang tersebut.

Sebagai upaya yang dikerjakan oleh pemerintah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dengan menerapkan Undang-undang pembuktian terbalik. Menyikapi hal tersebut perlu penanganan yang ekstra karena efek kerugian Negara yang ditimbulkan pelaku. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pembuktian terbalik bagi pelaku di Pengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris melihat fenomena di lapangan terkait dengan pencucian uang (Soerjono Soekanto, 2006). Disamping itu, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dengan menyelidiki secara cermat proses penerapan pembuktian sederhana di Pengadilan atau sekelompok individu (Sugiyono, 2006).

Adapun informan yang dilibatkan adalah Hakim, Jaksa, dan Penyidik Kepolisian. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil wawancara ditranskrip dan ditulis dalam narasi sampai dengan menarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam proses pembuktian terbalik biasanya dibebankan kepada terdakwa, dimana seorang terdakwa mesti mampu memainkan perannya melakukan pembelaan diri jika memang tidak

bersalah (Schneider et al., 2015). Caranya adalah dengan menyiapkan alat bukti. Sejalan dengan itu, ia bisa menggunakan haknya yaitu pertama, membuktikan, bahwa ia tidak melakukan delik. Oleh sebab itu, Penuntut Umum wajib membuktikan dalilnya, dan terdakwa juga berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya sendiri,

Oleh karena itu, secara teknis, seorang Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan sebaliknya terdakwa juga beserta penasehat hukum membuktikan sebaliknya. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan paling tidak ada dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan setidaknya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi.

Selanjutnya dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) “Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Adapun alat bukti sah yang dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tentu dari kelima jenis alat bukti tersebut harus terpenuhi. Penjelasan tersebut juga dipertegas oleh pendapat Yahya bahwa seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah ketika kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta dibarengi dengan keyakinan hakim. Dalam proses persidangan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan melakukannya.

Apabila terdakwa telah mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum harus tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan mencari alat bukti yang lain. Adanya pernyataan bersalah dari terdakwa tidak bisa mengaburkan kewajiban penuntut umum menambah dan menyempurnakannya dengan alat bukti lain untuk memperkuat pembuktian (Setiadi & Harefa, 2019).

Pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi dasar pemikiran dilakukannya pembuktian terbalik dalam persidangan. Dibentuknya Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk walaupun sudah ada komitmen dan *political will* Negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang, namun diperlukan juga upaya pemerintah untuk bekerjasama dengan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Saat suatu tindak pidana dapat dideteksi jika aparat penegak hukum bersinergi dengan semua *stakeholder*. Akan tetapi yang menjadi tantangan utama penegak hukum adalah aspek pembuktian. Pembuktian menjadi titik kunci untuk mendapatkan keyakinan bahwa seseorang melanggar hukum atau tidak.

Pelaku kejahatan sulit dibuktikan disebabkan mereka selalu mengaburkan bukti-bukti (Zabyelina, 2015). Untuk mengatasinya, diperlukan strategi yaitu pertama menelusuri aliran uang hasil kejahatan yang disembunyikan. Melakukan *profiling* terhadap pelaku, mulai dari keluarga dan merampas harta kekayaannya.

Implementasi Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Medan

Pelaku pencucian uang selalu mengambil modus operandi dengan memanipulasi aset, sehingga kesannya

legal (Yazid Mohd Bin Kepli and Nasir Maruf Adeniyi, 2016).

Jika merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikatakan sah apabila melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar atau dalam negeri (Indrianto Seno Adji, 2006).

Pelaku pencucian uang pada dasarnya melakukannya melalui beberapa tahapan, diantaranya seperti penempatan, penyebaran/transfer dengan memisahkan transaksi keuangan serta menggunakan harta kekayaan (Tiwari et al., 2020). Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dinikmati langsung maupun diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan (Hanafi, 2013).

Keseriusan Negara Indonesia untuk memberantas permasalahan pencucian uang dibuktikan dengan membuat regulasi anti pencucian uang (Arnone & Borlini, 2010). Terutama penekanan dalam proses pembuktian terbalik di persidangan.

Dalam Pasal 77 dan Pasal 78 menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Pada penjelasan pasal ini tertera cukup jelas, sehingga konstruksi hukum pada undang-undang ini mengamanatkan bahwa terdakwa tidak lagi “diberi kesempatan” dalam pembuktian terbalik, namun “wajib” untuk melakukannya. Inilah kelebihan undang-undang pencucian uang yang baru dibanding undang-undang yang lama (Wibowo, 2018).

Pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 tentu sangat mempunyai keistimewaan tersendiri yaitu terdakwa harus membuktikan asal usul

harta kekayaan yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana, misalnya bukan dari korupsi, narkoba serta perbuatan haram lainnya

Konsekuensi yuridis apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, tidak berarti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini hanya berlaku untuk salah satu unsur mengenai asal usul harta kekayaannya.

Oleh karenanya pembuktian keseluruhan unsur kejahatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, menghibahkan, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan masih harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Pembuktian terbalik yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa menimbulkan anggapan dan persepsi atas penyimpangan asas praduga tak bersalah dan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dimana adanya proses perpindahan beban pembuktian dalam KUHAP yakni jaksa secara umum memiliki kewajiban untuk membuktikan namun dibebankan kepada pelaku tindak pidana.

Penerapan pembalikan beban pembuktian pada UU No. 8 tahun 2010 bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil kejahatan. Meskipun kejahatan pencucian uang ini lahir dari kejahatan asalnya, namun rezim anti pencucian uang menempatkan pencucian uang sebagai salah satu kejahatan yang tidak bergantung kepada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukan proses penyidikan.

Dengan demikian sistem pembuktian terbalik yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdakwa diwajibkan membuktikan

bahwa harta kekayaan yang terkait bukan merupakan hasil tindak pidana, namun jaksa tetap juga diberikan beban untuk membuktikan unsur kesalahan terdakwa. Oleh sebab itu dalam sistem pembalikan beban pembuktian juga menganut sistem pembuktian secara tidak murni (pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang) dan sistem pembuktian negatif dalam KUHAP. Berikut ini disajikan hasil penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) tahun 2019.

Tabel.1 Data Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tahun 2019 Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

No.	Uraian Kejahatan	Pasal yang Disangkakan
1.	Dugaan Penyimpangan dalam pembelian surat berharga (Medium Term Notes) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) oleh PT. Bank Sumut Tahun 2017-2018 yang diduga merugikan Keuangan Negara/Keuangan Daerah yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang.	Pasal 3, Pasal 4, Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sumber: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 2021

Dalam temuan kasus tindak pidana pencucian uang di Kota Medan dengan pasal yang disangkakan sebagai tertuang dalam Pasal 3 dan 4 dapat dijelaskan bahwa “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah)”. Pasal 4 “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bentuk kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, khususnya terdapat dalam kata-kata harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, maka dapat dipastikan sebagian untuk kesengajaan, sebagian untuk kealpaan. Konsekuensi logisnya, pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tetapi juga kealpaan yang dialternatifkan dengan kesengajaan. Dalam konteks teori penyebutan *culpa* berarti akibat yang dilarang timbul dari kealpaannya, sedangkan *culpa* tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satunya *culpakan*.

Ketentuan pada Pasal 3 dan 4 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 yang menjelaskan adanya tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, untuk menetapkan telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang dan pelakunya, maka terlebih dahulu dibuktikan adanya tindak pidana asal. Akan tetapi ketentuan itu menjadi tidak jelas atau kontradiktif dengan adanya ketentuan Pasal 69 yang menyatakan “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

SIMPULAN

Pengaturan hukum pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang tertuang dalam Pasal 77 dan Pasal 78 mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu maksud pembuktian terbalik adalah beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal usul harta kekayaan yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana, misalnya bukan dari korupsi, narkoba serta perbuatan haram lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Penerapan pembalikan beban pembuktian pada UU No. 8 tahun 2010 bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Choirinnisa, S. A. (2019). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Mercatoria, 12(1).
- Arnone, M., & Borlini, L. (2010). *International anti-money laundering programs: Empirical assessment and issues in criminal regulation*. Journal of Money Laundering Control, 13(3), 226-271. <https://doi.org/10.1108/13685201011057136>
- Bismar Nasution. (2014). *Hukum Rezim Anti Money Laundering*. www.bismarnasution.com
- Centre, A.-C. R. (2010). *International anti-money laundering laws*. August, 2-5.
- Hanafi, H. (2013). *The Internationalization Of Anti-Money Laundering and The Compliance Of States*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20(3), 343-361. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art1>
- Indrianto Seno Adji. (2006). *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*.
- Miroharjo, D. (2015). *Strengthening the Indonesian Money Laundering Regime through Embodying the Pancasila Principles*. International Journal of Humanities and Social Science, 5(5), 173-182.
- Schneider, F., Raczkowski, K., & Mróz, B. (2015). *Shadow economy and tax evasion in the EU*. Journal of Money Laundering Control, 18(1), 34-51. <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2014-0027>
- Setiadi, W., & Harefa, B. (2019). *The principle of reversal burden of proof in act of money laundering in Indonesia*. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 9(7), 197-209.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tiwari, M., Gepp, A., & Kumar, K. (2020). *A Review Of Money Laundering Literature: The State Of Research In Key Areas*. Pacific Accounting Review, 32(2), 271-303. <https://doi.org/10.1108/PAR-06-2019-0065>.
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Wibowo, M. H. (2018). *Corporate Responsibility in Money Laundering Crime (Perspective Criminal Law Policy in Crime of Corruption in Indonesia)*. Journal of Indonesian Legal Studies, 3(02), 213-236. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.22740>
- Yazid Mohd Bin Kepli and Nasir Maruf Adeniyi. (2016). *Money Laundering: Analysis of Placement Methods*. International Journal of Business, Economics and Law, 11(5), 32-40.
- Zabyelina, Y. G. (2015). *Reverse Money Laundering In Russia: Clean Cash For Dirty Ends*. Journal of Money Laundering Control, 18(2), 202-219. <https://doi.org/10.1108/JMLC-10-2014-0039>.